



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 134-142

Agama Dan Gesekan Kepentingan Kapitalisme Global Pasca Transisi (Refleksi Atas “Kegagalan” Agama Dalam Mengimbangi Arus Kapitalisme Di Indonesia)

Mastur

mastur@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Indonesia

Abstrak

“Oleh karena kerasnya benturan kepentingan dalam dunia global, maka agama menemukan titik keterpurukan dalam merespon dan tawaran solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang mengemuka. Hal ini terjadi karena agama merupakan realitas theologis-doktrinal pada satu sisi dan historis-cultural disisinya yang lain. Sementara, biasanya agama hanya dipahami dalam sisinya sebagai realitas theologis-doktrinal oleh pemeluknya yang pada akhirnya menyebabkan agama menjadi kering ketika berbenturan dengan ruang dan waktu, sedangkan serangan kapitalisme dan globalisasi menjadi sesuatu yang nyata dengan basic need sebagai propagandanya.”

Pendahuluan

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara bangsa yang menempatkan agama sebagai sentral peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nampaknya tidak dapat disangkal. Bagaimana tidak, bangsa Indonesia dengan beberapa agama yang diformalkan (Hindu, Budha, Islam, Katholik, Protestan dan Konghucu ditambah beberapa aliran kepercayaan) menjadi indikasi minimal dalam mengasumsikan kecenderungan masyarakat bangsa Indonesia menilai segala realitas dengan paradigma theosentris. Hal ini paling tidak tampak dalam setiap proses politik bangsa ini. Menjamurnya partai politik yang memiliki plat form, orientasi, misi dan visi keagamaan pada era Soekarno dan era reformasi menjadi pembenar bahwa bangsa Indonesia mengandaikan nusantara berjalan dan berdiri diatas nilai-nilai keagamaan baik secara formal-tekstual maupun esensial-kontekstual. Dalam konteks kekuatan politik nasional, pada zaman Soekarno secara umum dapat dikategorikan kedalam empat kekuatan politik yakni; kekuatan nasionalis, komunis, religius dan militer. Kelompok nasionalis diwakili oleh PNI (partai nasionalis



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 134-142

Indonesia) yang dipimpin oleh Soekarno, sedangkan kelompok komunis direpresentasikan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), Religius oleh Parta Masyumi dan PNU dan militer oleh Soeharto dengan strategi standard gandanya. (Robert W. Hefner, 2000 : 103)

Dalam meletakkan dasar negara pada awal berdiriny negara Indonesia, terjadi perdebatan yang cukup sengit antara kelompok nasionalis dengan religius (agamawan). Kelompok religius terutama tokoh-tokoh agama Islam sebagai agama yang pemeluknya mayoritas menginginkan negara ini didirikan diatas asas-asas syari'ah yang tertuang dalam piagam Jakarta, - hal ini coba diperjuangkan lagi di era reformasi oleh kelompok-kelompok Islam Formalistik - sedangkan kelompok nasionalis yang dikomandani oleh Soekarno dan kawan-kawan menginginkan negara didasarkan atas prinsip-prinsip pularisme, hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk (plural).

Keterlibatan kelompok-kelompok agamawan dalam penentuan ranah aturan kebangsaan sepanjang sejarah kebangsaan telah membuktikan signifikansi agama dalam aras berbangsa dan bernegara dinegeri ini. Munculnya lembaga-lembaga keagamaan formal seperti Departemen Agama (Depag), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa lembaga yang dibentuk oleh agama Hindu, Budha, Katholik, Protestan maupun Konghucu semakin mengukuhkan eksistensi agama dinegeri ini. Walaupun tanpa disadari terkadang kepentingan-kepentingan kapitalisme menelisik melalui lembaga-lembaga keagamaan ini.

Agama dan Kapitalisme Dalam Pentas Sejarah Indonesia

Dari perspektif ekonomi historis, Robert W. Hefner (2000 : 129) melaporkan bahwa perkembangan ekonomi melalui industrialisasi dinegara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara -termasuk Indonesia didalamnya- selama lebih dari dua puluh tahun untuk Asia Tenggara dan tiga puluh tahun di Asia Timur telah mengalami perluasan pada angka 5 hingga 8 persen pertahun. Pada periode yang sama, manufaktur tumbuh dua atau



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 134-142

tiga kali lipat. Hal ini paling tidak menggambarkan tingkat ketergantungan wilayah Asia terhadap kapitalisme. Sebelumnya orang berpandangan bahwa kekuasaan kapitalisme hanya terbatas pada barat industrial.

Nampaknya ketergantungan bangsa Indonesia terhadap kapitalisme telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yakni sejak dimulainya kolonialisme dan imperialisme pra kemerdekaan sekitar dua abad yang lalu. Asumsi ini diajukan paling tidak berkaitan dengan kenyataan bahwa kapitalisme adalah kepanjangan atau kontinuitas dari imperialisme dan kolonialisme yang berakar ideologis liberalisme, dimana kapitalisme kemudian menjadi sangat mudah ditebak yakni kapitalisme merupakan “panglima” Globalisasi (Mansour Fakih, 2002: 209). Di awal kemerdekaan bangsa Indonesia sangat terasa tarik menarik kepentingan dua ideologi besar yakni kapitalisme dan sosialisme, bahkan dalam masa transisi menjelang diakuinya kemerdekaan Indonesia tarik-menarik kepentingan kedua ideologi tersebut sangat kental, dimana sosialisme pada saat itu diwakili oleh Nippon dan kapitalisme diwakili oleh negara-negara sekutu. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan masing-masing ideologi tersebut dalam menancapkan akarnya untuk dijadikan ideologi negara bagi negara yang baru berdiri ini.

Sedangkan agama dalam konteks ke-Indoesia-an seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan realitas yang tak terelakkan, karena jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia, tradisi masyarakat nusantara adalah masyarakat beragama mulai dari bentuknya yang paling primitif yakni menyembah batu, kayu atau tempat-tempat yang dianggap keramat yang kemudian disebut dengan istilah gama animisme sampai pada agama yang bentuknya rasional-modern seperti yang kita lihat dewasa ini. Dengan kenyataan ini, maka tidak mengherankan jika kemudian, dalam sejarah perjuangan bangsa tercatat signifikansi kelompok agamawan yang cukup besar dalam kerangka ikut serta berjuang mengusir kaum imperialis dan kolonialis dari bumi pertiwi. Perjuangan heroik kyiai, pendeta, bungsu, romo dan sebagainya dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa dan sekaligus



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 134-142

membuktikan eksistensi agama dalam perjalanan sejarah bangsa. Pada masa-masa ini, doktrin agama mampu dijadikan spirit perjuangan dalam rangka membumi hanguskan setiap bentuk imperialisme maupun kolonialisme oleh tokoh-tokoh agama. Perjuangan KH. Imam Bonjol mungkin bisa dijadikan satu contoh akan peran kelompok agamawan dalam proses perjuangan bangsa.

Pada rezim pemerintahan Soekarno pertarungan agama dan kapitalisme juga sangat tanpak. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa negeri-negeri kolonialis dan imperialis pasca era kolonialisme dan imperialisme membutuhkan gaya dan motif baru dalam mencengkeram negara-negara bekas jajahannya. Walaupun soekrno pada saat itu, mencoba menekan pengaruh kapitalisme dalam kabinetnya, namun hal itu tidak sepenuhnya bisa berjalan. Sistem kapitalis yang timpang, tidak adil, menindas kemudian menyebabkan terjadi pertentangan-pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama.

Menjelang runtuhnya rezim orde lama yang memunculkan soeharto sebagai presiden penggantinya, sesungguhnya merupakan suatu proses pertarungan kepentingan antara kapitalisme dan sosialisme. Dimana hal ini tampak ketika pada saat itu Soviet sebagai negara besar penganut sosialisme tidak sepenuhnya mendukung Soekarno karena Soviet menilai Soekarno tidak sepenuh hati mendukung PKI, walaupun presiden Soekarno telah mencoba memainkan dua kekuatan politik yang sedang populer saat itu dengan konsep NASAKOM (Nasionalis-Agamis- Komunis). Namun presiden Soekarno melupakan satu kekuatan politik yang juga cukup besar dinegeri ini yakni kekuatan politik religius (agamis). Kondisi ini tidak disia-siakan oleh Soeharto dengan developmentalisme-kapitalis dibelakangnya. Dalam konteks ini kelompok atau kekuatan religius dimanfaatkan atau ditunggangi oleh Soeharto (kapitalisme dan militer). Dus, bangsa Indonesia selama kurang lebih 32 tahun akhirnya dipimpin oleh rezim developmentalisme-kapitalis yang terbukti saat ini telah meluluh lantakkan sistem kehidupan bangsa Indonesia.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 134-142

Mansour fakih (2002 : 85) mengatakan bahwa krisis yang terjadi di Asia Timur - termasuk Indonesia tentunya - yang menganut teori pembangunan kapitalisme sangat mengejutkan, mengingat krisis terjadi pada negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat didunia, sekaligus juga merupakan krisis yang tercepat dan yang paling tidak dapat diramalkan. Padahal, neger-negeri Asia Timur sedang menjadi contoh dan model bagi pembangunan dunia. Sebelum krisis terjadi, pertumbuhan negara-negara tersebut mencapai angka yang menakjubkan. Dari tahun 1965-1999, perekonomian di Asia Timur tumbuh lebih pesat dari pada seluruh regio di manapun di dunia. Pertumbuhan yang belum pernah dicapai oleh negara barat sekalipun. Bank dunia (1993) mengakui bahwa pusat-pusat pertumbuhan itu ada didelapan tempat, yakni Jepang, dan “Empan Macan Asia” yakni; Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, serta *Newly Industrial Economics* (NIEs) di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand. Negara-negara yang menggunakan teori pembangaunan-pertumbuhan cepat (*rapid growth*) tersebut saat ini telah mengalami proses kejatuhan.

Prospek Agama Pasca Transisi

Agama menurut bahasa aslinya, bahasa latin berarti kesadaran dan kesalehan disatu sisi dan menghubungkan atau mengikat disisi yang lain. Dengan kata lain, agama didefinisikan sebagai seperangkan doktrin spiritual dan metafisika yang mengikat orang yang memeluknya. Agama, selama bertahun-tahun, juga menjadi sistem pengertian (*signification*), sistem simbol dan sistem ibadah yang menyediakan *sense of identity* yang mendalam bagi penganutnya untuk menghadapi hidup didunia yang kompleks ini sebagai sebuah tantangan eksistensial (Asghar Ali Anginer, 2002 : 87). Dalam sejarah kehidupan manusia , sebenarnya agama menjadi wadah pencarian hidup, kebenaran dan kepastian yang hakiki. Namun demikian, dan ini sisi negatifnya, proses pencarian kebenaran tersebut seringkali kehilangan dinamikanya dan mengkristal menjadi dogma-dogma yang tidak bisa berubah. Kemudian dogma-dogma ini dilengkapi dengan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 134-142

rangkaian ibadah yang menjadi “pelipur lara” dan rasa kepatuhan simbolik (*a sense of symbolic fulfilment*) bagi orang-orang yang beriman.

Beberapa ilmuwan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan metafisika yang sangat abstrak, sehingga justru mereka tidak pernah menyentuh masalah-masalah eksistensial kemanusiaan maupun kepastian nasib manusia. Bagi mereka, agama hanya menjadi latihan intelektual murni, tidak menjadi sebuah kode etik dan aturan moral yang dinamis yang menjadi pedoman bagi pemeluknya untuk mengarahkan kehidupan spiritualnya supaya lebih bermakna tanpa mengabaikan kebutuhan-kebutuhan material yang pokok (*basic need*); juga agama tidak menjadi petunjuk untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan menyatukan hidupnya dengan proses kosmogenik. Dengan demikian, agama menjadi rangkaian ibadah yang kering (*a set of dead ritual*) bagi pemeluknya disatu sisi, dan menjadi seperangkat doktrin yang abstrak dan metafisis yang sulit dipahami (*set of abstract, incomprehensible metaphysical doctrine*) disisi yang lain.

Seandainya bisa menjadi petunjuk yang bermakna, yang memperhatikan nasib manusia baik didunia maupun diakhirat agama tidak akan sekedar menjadi rangkaian ibadah yang steril dan menjadi justifikasi theologis. Akan tetapi, untuk menjadi petunjuk yang sedemikian tidaklah mudah. Manusia, pada tingkat yang paling primitif, secara material dan intelektual membutuhkan agama yang disertai dengan ibadah, sedangkan pada saat tertindas dan tersiksa, manusia membutuhkan agama sebagai pelipur lara. Dalam konteks ini, para ilmuwan dan teolog diujung keekstrimannya teracuni oleh abstraksi intelektualnya, menikmati patron kemapanan dan sangat takut kalau-kalau menggangukannya. Abstraksi-abstraksi metafisis mereka yang telah menjadi jargon, mengisi setiap celah kemapanan dan berusaha mempertahankannya dari keruntuhan.

Jika agama hendak menciptakan tatanan sosial, dan menghindarkan diri dari sekedar menjadi pelipur lara dan tempat berkeluh kesah, agama harus mentransformasikan diri menjadi alat yang canggih untuk melakukan perubahan sosial, menjadi sebuah agen yang secara aktif melakukan perubahan terhadap tatanan sosial yang telah diusung yang dengan sendirinya memiliki mekanisme sosial-legal dan politik-



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 134-142

ekonomi yang digunakan untuk mempertahankan hak-hak khusus dan kekuasaan “kasta yang tinggi” dan kelas atas. Dari sini timbul pertanyaan dapatkah agama memberi kemungkinan bagi dirinya untuk memainkan peran baru tanpa kehilangan semangat dan kedudukan yang sebenarnya?. Menilik sejarah berdirinya atau turunnya agama-agama yang biasanya menjadi gerakan kuat yang menentang bukan saja agama-agama yang sebelumnya telah mapan, namun juga menentang struktur kekuasaan yang sedang berlangsung.

Dengan demikian agama sesungguhnya bisa dijadikan *elan vital* perlawanan terhadap sistem yang menindas. Globalisasi sebagai suatu sistem pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa kedalam suatu sistem ekonomi global. Dimana globalisasi merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Dan orang kemudian mencurigai globalisasi sebagai bungkus baru imperialisme dan kolonialisme. Di era pasca transisi ini yang dikomandani oleh Joko Widodo (Jokowi) dan M. Yusuf Kalla yang keduanya berlatar belakang pengusaha berpotensi melahirkan sistem kapitalis-globalisme dengan bungkus baru. Gejala tersebut bisa terlihat dengan koalisi kerakyatan yang coba dibangun, ditambah lagi tim suksesnya mencoba membangun semacam telewicara yang menghubungkan langsung dengan rakyat. Hal ini kemudian menjadi tantangan dan kewajiban bagi kelompok agamawan untuk memainkan perannya melakukan *balances* terhadap arus globalisasi.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 134-142

Daftar Pustaka

- Anas, Ahmad (2003), *Menguak Pengalaman Sufistik, Pengalaman Keagamaan Jama'ah Maulid al-Diba' Girikusumo*, Yogyakarta, Wali Songo Prsess Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar
- Arkoun, Muhammad (1998), *Islam dan Modernitas*, Jakarta Selatan, Paramadina
- Davies, Paul (2002), *Tuhan, Doktrin dan Rasionalitas Dalam Debat Sains Modern*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru
- Dirdjosanjoto, Pardjarta (1999), *Memelihara Ummat Kyai Pesantren - Kyai Langgar di Jawa*, Yogyakarta, LKIS
- Enginer, Ali Asghar, *"Islam dan Teologo Pembebasan"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Fakih, Mansour DR. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Blobalisasi"*, Yogyakarta, INSIST Press 2002



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 134-142

Hefner, W. Robert (2000), *Islam Pasar Keadilan Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi*, Yogyakarta, LKIS

Ph.D. M.A. Mas'ud, Abdurrahman (2004), *Intelektual Muslim Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta, LKIS

Rahmat, Jalaluddin DR. Prof. (2002), *Psikologi Agama (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sinetar, Marsha (2001), *Spiritual Intellegence (Kecerdasan Spiritual) Belajar Dari Anak Yang Mempunyai Kesadaran Dini*, Jakarta, Pertama kali diterbitkan oleh : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI

Zakiah, Daradjat DR. Prof. (1996), *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Bulan Bintang